EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM MENANGANI PENYEBARAN COVID-19 DI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA

Jhonar JosesYarisetouw
NPP. 29.1766
Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Publik

Email: Nyongdoto@gmail.com

ABSTRACT

The title of this Skripsi is **"Effectiveness of Procurement of Goods and Services in Handling the Spread of Covid-19 by the Health Office of Papua Province".. Purpose :** This research aims to find out how to plan the procurement of goods and services effectively. This study uses descriptive research **Method:** with inductive approach, where the author tries to collect data with qualitative analysis techniques through triangulation method and based on existing facts. **The data collection :** techniques used are interview and documentation. **Result:** The results of this study can be concluded that in general the planning of procurement of goods and services in handling the spread of Covid-19 has not been in accordance with the guidelines that have been set. This is because the transportation access to regencies in Papua Province has limitations that transport goods and services, the Local Government has not carried out the procurement of goods and services to the maximum. **Conclusion:** Based on the results of this research, it is recommended that specifically for the procurement of goods and services in handling Covid-19 to be the top priority and the Local Government is more concerned in the procurement of goods and services in handling Covid-19 is carried out in accordance with its authority.

Keywords : Effectiveness, Goods and Services, Covid-19

ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah **"Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Di Dinas Kesehatan Provinsi Papua"**. **Tujuan :** Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengadaan barang dan jasa yang efektif. Penelitian ini menggunakan **Metode :** penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dimana penulis berusaha mengumpulkan data dengan teknik analisa kualitatif melalui metode triangulasi serta berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun **Teknik pengumpulan data :** yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hasil atau temuan penelitian ini adalah bahwa secara umum perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 belum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh akses transportasi untuk menuju ke Kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua mengalami keterbatasan yang mengangkut barang dan jasa, maka Pemerintah Daerah belum melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara maksimal. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan supaya khusus

untuk pengadaan barang dan jasa dalam menangani Covid-19 untuk menjadi prioritas utama dan Pemerintah Daerah lebih memperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa dalam menangani Covid-19 ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Kata Kunci : Efektifitas, Barang dan Jasa, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adaIah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Maka dari itu, daIam masa pandemi saat ini yang terjadi di lndonesia, maka Pemerintah Daerah merasa berkewajiban untuk memutuskan penanganan yang tepat.

Kewenangan yang telah di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam masa pandemi saat ini yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memutuskan penanganan yang tepat. Saat ini dunia sedang mengalami bencana pandemi *Covid-19*, penyebaran virus ini membawa resiko bagi Kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai balahan dunia, termaksud Indonesia.

Terjadinya Pandemi Covid-19 pa da awal Tahun 2020 ini, menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia khususnya dan dunia umumnya. kondisi ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan dengan segera.

Pemerintah pusat dan daerah dalam merespon hal ini, dalam meangani penyebaran virus corona yang mendunia. Maka urusan Kesehatan yang selama ini dijalankan dalam konteks prinsip desentralisasi sebagai urusan pemerintah daerah telah menciptakan rasa kawatir pemerintah dalam merespon wabah Covid-19. Covid-19 menjadi kedaruratan Kesehatan Bersama, kegiatan selanjudnya merupakan mencegah atau melaksanakan berbagai protokol Kesehatan yang telah di tentukan dalam menghadapi kedaruratan Kesehatan masyarakat. Dibentuk satuan tugas Covid-19, agar dapat mencegah penyebaran Covid-19 dan menjalani ke-4 protokol memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjaga imun. Dalam hal ini ke-4 protokol ini diharapkan agar membuat masyarakat menerima informasi yang benar terkait wabah Covid-19 di Indonesia.

Covid-19 adalah virus yang menyebarkan penyakit kepada hewan atau juga pada manusia. Indonesia masih melawan Covid-19 hingga tahun 2021, Adapun juga di negara-negara lain yang masih terserang Covid-19. Total kasus Covid-19 terus meningkat dengan beberapa kesembuhan, tapi tidak sedikit yang meninggal. Kegiatan pencegahan selalu di lakukan demi menghindari Covid-19 dengan gejala yang mirip dengan flu. Virus ini dimulai dengan *pneumonia* atau radang paru-paru misterius.virus infeksi *pneumonia* misterius ini sangat banyak di dapatkandi pasar hewan di Wuhan China. Covid-19 diketahui berasal dari kelelawar dan hewan-hewan lain yang di makan manusia hingga terjadi penularan. Covid-19 sebenarnya sudah tidak asing lagi dalam dunia Kesehatan hewan, tetapi cumin beberapa jenis-jenis yang bisa menginfeksi manusia sampai menjadi penyakit radang paru. Kasus ini di lansir terkait dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual belikan berbagai jenis-jenis daging binatang, dimana yang tidak biasa di konsumsi seperti binatang ular, kelelawar, ataupun berbagai jenis hewan lainnya. Maka masalah ini memuat tentang Covid-19 menyebar sangat cepat sampai mengakibatkan infeksi yang sangat parah dan gagal organ. Organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 sampai saat ini makin menyebar luas hingga ditetapkan menjadi pandemic global oleh *World healt Organization* (WHO). Total penderita yang terkena Covid-19 pertama di Indonesia semakin cepat dan sudah menyebar luas keseluruh nusantara.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Indonesia termaksud negara yang terjangkit wabah Covid-19. Covid-19 sudah masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020 dan sampai saat ini jumblanya bertambah secara meningkat drastis tugas pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 tidak Cuma sekedar pada arah ketersediaan alat uji saja, tetapi juga memastikan agar para tenaga Kesehatan mempunyai Alat Pelindung diri (APD) agar meminimalisir terjangkit Covid-19 ketika melaksanakan penanganan. Percakapan darpemerintah pada waktu ini juga akan sampai ketersediaan obat untuk para penderita Covid-19. Intruksi presiden Nomor 4 Tahun 2020 memerintah kepada seluruh kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melakukan tindakan cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergi antara kementrian, Lembaga dan pemerintah aerah, termaksud dalam pengadaan barang dan jasa, untuk memudahkan para pihak menindaklanjuti intruksi Presiden di atas, diperlukan penjelasan yang sederhana untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19, dimana pemerintah dalam ini mampu memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan di luar rumah dan mematuhi protocol Kesehatan dan mengikuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar masyarakat tidak terpapar atau terkena covid- 19. Keadaan darurat ini membutukan sarana prasarana, alat material Kesehatan seta obat-obat yang harus segera disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam keadaan darurat ini, pengadaan barang dan jasa terkait penanganan pandemik Covid-19, dipayungi oleh ketentuan peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ dalam penanganan keadaan darurat dan SE LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka penanganan Covid- 19. Provinsi papua pada bulan April 2020 mencatatkan kasus perdana di kabupaten nabire dan sampe saat ini kasus corona semakin meningkat, dan untuk menangani penyebaran Covid-19 masih banyak kendala yaitu dari tenaga medis, kurangnya Alat Pelindung Diri (APD), Masker, dan Obat-Obatan bagi pasian yang terpapar Covid-19. tercatat Kompas.com-jumlah kasus covid-19 pada tanggal 16 Agustus 2021, di temukan 2.461 kasus baru.

Pengadaan barang dan jasa masih banyak kendala untuk menangani penyebaran Covid-19, Provinsi Papua yang menjadi kendalasaat ini adalah transportasi ke daerah-daerah terpencil dan kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis,maupun pengeriman hasil sampel rapid test, PCR-test, dan lain-lain, Umumnya terdapat kendala pada pelaksanaannya apa yang menjadi pengadaan barang dan jasa untuk menganalisa sampai dimana efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua. Kegiatan pengadaan barang an jasa untuk menangani penyebaran Covid-19 dalam hal ini oleh pemerintah daerah harus memperhatikan percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Pengadaan barang dan jasa maupun konteks Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19. Penelitian Andi Nasir, berjudul Tanggung Jawab penyelenggara an pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap peralatan Kesehatan (Andi Nasir, 2013), menemukan bahwa Substansi tanggung jawab masih terlihat sangat kurang dan tidak memiliki konsistensi dengan ketentuan yang dipersyaratkan seiring dengan adanya beberapa permasalahan mendasar seperti penerapan prinsip pengadaan yang belum dilaksanakan sepenuhnya, masih sulitnya menerapkan beberapa ketentuan pengadaan seperti sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang wajib dimiliki serta pihak penyelenggara pengadaan peralatan kesehatan tidak maksimal dalam menilai kelengkapan suatu dokumen pengadaan seperti syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, adanya spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), daftar kuantitas harga, surat penawaran dan surat jaminan

serta terkadang memerlukan proses waktu yang lama sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan pekerjaan. Penelitian Himawan Sasongko,Chriswadhani Suryawati & Mursid Rahardjo (2020), dengan judul Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa pada masa pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap kondisi Keuangan Rumah Sakit di RSUD Dr. Kariadi Semarang, Menemukan bahwa pengaruh pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi COVID-19 terhadap kondisi keuangan di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2020 menemukan hasil sebagai berikut : 1.Terdapat perbedaan metode PBJ yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 jika dibandingkan sebelum masa pandemi. 2. Prinsip – prinsip dan etika PBJ telah diterapkan saat prosedur pengadaan barang/jasa pada situasi pandemi COVID-19. 3. Rencana Umum Pengadaan Tahun 2020 RSUP Dr. Kariadi mengalami perubahan sehubungan dengan kondisi keuangan rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Penelitian Adriansyah Mohammad Benny Alexandri, Mas Halimah (2014), dengan judul Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, mendapatkan hasil bahwa Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terkait sumber daya sumber belum sepenuhnya memadai baik segi kualitas dan kuantitas dimana masih ada beberapa PA/KPA dan PPK yang belum memiliki sertifikasi serta dalam hal perencanaan mengenai identifikasi kebutuhan belum dilaksanakan secara maksimal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang seharusnya mampu menekan angka covid-19 dan menghentikan penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua, metode penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dimana penulis berusaha mengumpulkan data dengan teknik analisa kualitatif melalui metode triangulasi serta berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang juga berbeda dengan penelitian Andi Nasir, Himawan Sasongko,Chriswadhani Suryawati & Mursid Rahardjo, maupun Penelitian Adriansyah Mohammad Benny Alexandri, Mas Halimah dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Metode Penelitian Efektivitas menurut Siagian (2008:77) yang menyatakan bahwa Efektivitas memiliki enam Indikator, yaitu Kejelasan tujuan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, PeIaksanaan efektif dan efisien, Bentuk pengawasan dan pengambilan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua, Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi dalam efektivitas barang dan jasa Dinas Kesehatan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam efektivitas pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua.

II. METODE

peneIitian ini menggunakan metode peneIitian kuaIitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. metode peneIitian kuaIitatif merupakan suatu metode peneIitian yang digunakan untuk meneIiti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneIiti adalah sebagai instrumen kunci Sugiyono (2009:8), Metode peneIitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri mandiri, baik hanya satu viriabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain Sugiyono (2017:2), Dan Pendekatan induktif adaIah cara berpikir agar memberikan aIasan yang dimuIai dari pernyataan-pernyataan khusus agar menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. AIasan secara induktif banyak digunakan untuk menjeIajaki aturan- aturan aIamiah dari suatu fenomena. DaIam aIasan induktif, suatu kesimpuIan umum diambil dari pernyataan spesifik Nazir (2013:166).

Penulis mengumpulkan data melaui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Subbagian Program, dan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. Adapun penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Efektivitas menurut Siagian (2008:77) yang menyatakan bahwa Efektivitas memiliki enam Indikator, yaitu Kejelasan tujuan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, PeIaksanaan efektif dan efisien, Bentuk pengawasan dan pengambilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan pendapat dari Siagian (2008:77) yang menyatakan bahwa Efektivitas memiliki enam Indikator, yaitu Kejelasan tujuan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, PeIaksanaan efektif dan efisien, Bentuk pengawasan dan pengambilan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kejelasan Tujuan

kejelasan tujuan yang hendak ditentukan yakni kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha peIaksanaan kegiatan operasional, dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Sub bagian Program Dinas Kesehatan Provinsi papua bapak Paskalis Howey, SKM., diruangannya pada hari Kamis 6 Januari 2022 beIiau mengatakan bahwa :

DaIam meIaksanakan pengadaan barang dan jasa yaitu agar terlaksananya pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19, yang mana dalam hal ini sebagai Sub bagian Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua sendiri menyadari dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa daIam menangani penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah bejalan efektif.

dengan hasil wawancara di atas penulis membuat kesimpulan kejelasan tujuan dalam pengadaan barang dan jasa daIam menangani Covid-19 di Provinsi papua agar dapat lebih di efektifkan lagi

3.2. Perencanaan yang matang

Pengadaan barang dan jasa daIam menangani penyebaran Covid-19 maka akan dibuat suatu perencanaan bagaimana dalam pengadaan barang dan jasa dapat efektif, dalam wawancara penulis lakukan bersama dengan Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kesehatan

Provinsi papua bapak Paskalis Howey, SKM pada hari Jumat 7 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa.

Untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa daIam menangani penyebaran Covid-19, hal ini di Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam pengadaan barang dan jasa masih terdapat kendala yaitu mengalami keterbatasan akses transportasi ke Kabupaten-Kabupaten di Provinsi papua di karenakan akses yang extrim dan sulit di jangkau dan hanya bisa mengunakan pesawat kecil untuk pengadaan barang dan jasa dan adapun juga anggaran yang yang terbatas.

Selain itu juga wawancara kepada bapak Imanuel A. R Imbiri, SKM., pada hari Jumat 7 Januari 2022 sebagai Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan beliau mengatakan bahwa : "Keterbatasan anggaran untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa daIam menangani penyebaran Covid-19 maka kami dari bagian Keuangan dan Perlengkapan memberikan masukan untuk anggaran pengadaan barang dan jasa Covid-19."

Berdasarkan hasiI wawancara di atas penuIis membuat kesimpuIan bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 masih kurangnya anggaran dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa.

3.3 Penyusun program yang tepat

Penyerapan Anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2020 bersumber APBD sebesar Rp. 133.327.352.210,14.- (76,5%) dari alokasi dana Rp. 174.376.359.092.04.- terjadi peningkatan penyerapan dana 6,9 % yang mana tahun 2019 penyerapannya 69,6 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp.267.536.145.700,- . Sedangkan penyerapan anggaran bersumber APBN Tahun 2020 sebesar Rp. 5.531.075.776.000.- (48,9 %) dari alokasi dana Rp. 11.303.403.000.

Pada tahun 2020 anggaran belanja yang bersumber dari APBD (DAU dan OTSUS) dengan Pagu dana sebesar Rp.228.792.600.512,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 180.255.128.797,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 78,8%. Dana ini dipergunakan untuk membiayai 19 program termasuk belanja tidak langsung, rincian realisasi kegiatan APBD dibawah ini :

Tabel 1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020

No	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU (Rp)		REALISASI	
		Awal	Akhir	Rp.	%
1	Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran	6.000.000.000	6.056.516.250,00	5.777.879.711,00	95,4
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56.516.250	2.300.000.000,00	2.004.117.000,00	87,1
3	Program Obat dan Perbekalan	9.780.372.255	7.017.576.120,00	6.117.030.415,00	87,2
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	850.000.000	8.260.000.000,00	4.939.244.033,00	59,8
5	Program Pengawasan Obat dan	69.200.000	69.200.000,00	0,00	-

6	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	1.629.127.650	1.364.455.650,00	796.494.650,00	58,4
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.490.000.000	1.014.790.000,00	1.006.188.700,00	99,2
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	62.196.149.735	61.838.812.516,00	44.192.626.626,52	71,5
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.069.552.535	583.476.990,00	160.121.000,00	27,4
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.085.733.495	11.190.975.530,00	9.098.578.548,00	81,3
11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	301.556.680	0,00		#DMO!
12	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	667.081.320	456.652.924,00	365.931.088,00	80,1
13	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	3.400.006.029	14.016.789.382,00	12.626.320.180,00	90,1
14	Program Upaya Kesehatan	81.430.099.370	27.790.521.804,00	16.180.427.760,00	58,2
15	Program Sumber Daya Kesehatan	41.162.768.323	20.774.880.040,04	18.836.046.655,62	90,7
16	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	16.629.020.000	5.744.140.500,00	5.699.947.900,00	99,2
17	Program Pengembangan Data dan Informasi	1.193.499.996	597.199.376,00	520.752.626,00	87,2
18	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	460.600.000	460.600.000,00	409.057.907,00	88,8
19	Upaya Kesehatan Perorangan	12.865.907.205	4.839.772.010,00	4.596.587.410,00	95,0
	Jumlah Belanja Langsung	247.337.190.843,00	174.376.359.092,04	133.327.352.210,14	76,5
	Belanja Tidak Langsung	54.416.241.420,00	54.416.241.420,00	46.927.776.587,00	86,2
	Total	301.753.432.263,00	228.792.600.512,04	180.255.128.797,14	78,8

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi dan realisai anggaran Dinas Kesehatan Provinsi papua tahun 2020. Merencanakan dalam jangka waktu kedepan untuk program menangani penyebaran Covid-19 apa saja yang menjadi program yang akan dibuat kedepannya, dalam wawancara penulis lakukan bersama dengan Bapak Sub Bagian Program Paskalis Howey, SKM., pada hari Kamis 6 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa :

Akan ada dibuat program yaitu dengan bagaimana pengadaan barang dan jasa agar lebih efektif dengan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan langkah-langkah untuk menangani penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 agar terlaksananya suatu program.

Selain itu juga wawancara kepada bapak Sub Bagian Program Paskalis Howey, SKM., pada hari Kamis 6 Januari 2022 sebagai Sub Bagian Program beliau mengatakan bahwa : “Program yang dibuat pada tahun 2019 sudah berjalan dengan efektif dan *refocussing* anggaran yang dibuat untuk

pengadaan barang dan jawsa dalam menangani penyebaran Covid-19 pada tahun 2020 sampai sekarang tahun 2022."
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis membuat kesimpulan bahwa dalam merencanakan program pengadaan barang dan jasa akan berjalan dengan dengan penyebaran Covid-19.

3.4 Tersedianya sarana dan prasarana

saIah satu efektivitas adaIah kemampuan kerja secara produktif. dengan sarana dan prasarana yang tersedia mungkin disediakan dalam sarana dan sarana dalam menangani penyebaran Covid-19, adapun sarana dan prasarana dalam menangani penyebaran Covid-19 di berbagai tempat yang mana dapat diIihat pada tabeI berikut :

TabeI 2
Jenis dan JumIah FasiIitas PeIayanan Kesehatan di Provinsi PapuaTahun 2020

No	KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT	STATUS AKREDITASI					
		JUMLAH	BELUM TERAKREDITASI	PERDANA	MADYA	UTAMA	PARIPURNA
1	RUMAH SAKIT MILIK PROVINSI	3	1	0	1	0	1
2	RUMAH SAKIT MILIK KABUPATEN/KOTA	25	10	10	1	3	1
3	RUMAH SAKIT MILIK TNI	5	2	1	0	1	1
4	RUMAH SAKIT MILIK POLRI	1	0	1	0	0	0
5	RUMAH SAKIT MILIK SWASTA/ YAYASAN	8	5	1	0	1	1
JUMLAH		42	18	13	2	5	4

Berdasarkan tabeI di atas dapat diIihat bahwa sarana kesehatan dalam menangani Covid-19 di Provinsi papua terutama sarana peIayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit TNI, dan Rumah Sakit POLRI dan Rumah Sakit SWASTA. Adapun anggaran tahun 2020 dalam pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Papua dapat diIihat pada tabeI berikut ini :

TabeI 4.11
Anggaran pengadaan barang dan jasa dalam menangani Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi PapuaTahun 2020

No	Uraian	Rincian Perhitungan			JumIah (Rp)
		Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	
1	Masker N95	3.000	Buah	150.000	450.000.000
2	Rapid Test COVID-19	89.260	Pkt	280.000	24.592.800.000
3	VTM (1000 pc/pkt (3000pkt x 1kt)	3.000	Pasang	120.000	360.000.000
4	BHP Pemeriksaan Rapid Test (50.000 ki x1 kl)	50.000	Kit	25.000	1.250.000.000
5	Sarung Tangan (1.000 box 1 kl)	1.000	Box	125.000	126.000.000
6	Masker Biasa	3.000	Buah	150.000	450.000.000
7	Desinfectan	1	Keg	60.143.000	60.143.000
8	APD set	500	Pkt	1,889.800	944.900.000
9	Baju Cover all	1.000	Box	176.000	175.000.000
Total anggaran					28.408.843.000

Berdasarkan tabeI di atas dapat diIihat bahwa anggaran tahun 2020 pengadaan barang dan jasa daIam menangani Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang mana masuk daIam sarana dan prasarana. DaIam wawancara bersama dengan Bapak Sub Bagian Program Paskalis Howey, SKM., pada hari Kamis 13 Januari 2020 beIiau mengatakan bahwa :
Pada saat pandemi Covid-19 ini kami di Dinas Kesehatan Provinsi Papua memang dalam sarana dan prasarana masih terbatas dikarenakan kabupaten di Provinsi Papua yang terbatasnya akses transportasi masuk ke Kabupaten Provinsi-Provinsi Papua dikarenakan lockdown.
Berdasarkan dari hasiI wawancara di atas penuIis mengambiI kesimpuIan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa dalam sarana dan prasarana yang masih menjadi kendaIa.

3.5 PeIaksanaan efektif dan efisien

Bagaimanapun baiknya suatu program pengadaan barang dan jasa apabiIa tidak diIaksanakan secara efektif dan efisien maka tidak akan mencapai sasarannya, daIam wawancara bersama Bapak Sub Bagian Program Paskalis Howey, SKM., pada hari Kamis 13 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa :
Dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa kami di Dinas Kesehatan Provinsi Papua sudah berjalan sesuai dengan aturan akan tetatapi dalam pengadaan barang dan jasa masih banyak

kendala di mana sebagai Sub bagian Program selalu Berkordinasi Bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas memberikan arahan kepada bawahannya agar bekerja sesuai dengan apa sudah menjadi tanggung jawab.
Berdasarkan dari hasiI wawancara di atas penuIis mengambiI kesimpuIan bahwa dalam perencaan barang dan jasa belum efektif dikarenakan masih banyak kendaIa pada Dana dan Transportasi juga medan tiap Kabupaten yang berbeda-beda.

3.6 Sistem pengawasan dan pengendaIian

Efektivitas organisasi menuntut terdapatnya bentuk pengawasan dan pengendaIian, dalam wawancara bersama Sub bagian Keuangan dan perlengkapan bapak Imanuel A. R Imbiri, SKM., pada hari Jumat 14 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa : "Terdapat pengawasan kepada Dinas Kesehatan terkait dengan pengadaan barang dan jasa daIam menangani Covid-19 dikarenakan sangat rawan dalam anggaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa."
Berdasarkan hasiI wawancara di atas penuIis mengambiI kesimpuIan bahwa dalam pengawasan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sudah terdapat pengawasan.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengadaan barang dan jasa masih banyak kendala untuk menangani penyebaran Covid-19, Provinsi Papua yang menjadi kendala saat ini adalah transportasi ke daerah-daerah terpencil dan kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis,maupun pengeriman hasil sampel rapid test, PCR-test, dan lain-lain, Umumnya terdapat kendala pada pelaksanaannya apa yang menjadi pengadaan barang dan jasa untuk menganalisa sampai dimana efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua. Kegiatan pengadaan barang an jasa untuk menangani penyebaran Covid-19 dalam hal ini oleh pemerintah daerah harus memperhatikan percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua.
Penulis menemukan temuan penting yakni dapak penyebaran Covid-19 di Provinsi Papua menyebabkan banyak permasalahan pada bidang ekonomi, Pendidikan, aktivitas masyarakat, dan terutama pada bidang Kesehatan. Sehingga penulis mengharapkan peran aktif dari Pemerintah daerah agar dapat menangani penyebaran Covid-19 dan mengefektifkan lagi pengadaan barang dan jasa khususnya pada peralatan Kesehatan. Sama halnya dengan temuan Andi Nasir, qmenemukan bahwa Substansi tanggung jawab masih terlihat sangat kurang dan tidak memiliki konsistensi dengan ketentuan yang dipersyaratkan seiring dengan adanya beberapa permasalahan mendasar seperti penerapan prinsip pengadaan yang belum dilaksanakan sepenuhnya, masih sulitnya menerapkan beberapa ketentuan pengadaan seperti sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang wajib dimiliki serta pihak penyelenggara pengadaan peralatan kesehatan tidak maksimal dalam menilai kelengkapan suatu dokumen pengadaan seperti syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, adanya spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), daftar kuantitas harga, surat penawaran dan surat jaminan serta terkadang memerlukan proses waktu yang lama sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan pekerjaan.
Selanjudnya temuan Himawan Sasongko,Chriswadhani Suryawati & Mursid Rahardjo (2020), dengan judul Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa pada masa pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap kondisi Keuangan Rumah Sakit di RSUD Dr. Kariadi Semarang, Menemukan bahwa pengaruh pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi COVID-19 terhadap kondisi keuangan di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2020 menemukan hasil sebagai berikut : 1.Terdapat perbedaan metode PBJ yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 jika dibandingkan sebelum masa pandemi. 2. Prinsip – prinsip dan etika PBJ telah diterapkan saat

prosedur pengadaan barang/jasa pada situasi pandemi COVID-19. 3. Rencana Umum Pengadaan Tahun 2020 RSUP Dr. Kariadi mengalami perubahan sehubungan dengan kondisi keuangan rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Dan temuan terakhir adalah temuan dari Adriansyah Mohammad Benny Alexandri, Mas Halimah (2014), dengan judul Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, mendapatkan hasil bahwa Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terkait sumber daya sumber belum sepenuhnya memadai baik segi kualitas dan kuantitas dimana masih ada beberapa PA/KPA dan PPK yang belum memiliki sertifikasi serta dalam hal perencanaan mengenai identifikasi kebutuhan belum dilaksanakan secara maksimal.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dinas Kesehatan Provinsi Papua saat ini memang dalam masalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa, untuk peIaksanaan pengadaan barang dan jasa daIam menangani penyebaran Covid-19. Dinas Kesehatan sendiri hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :
1. Perencanaan yang matang, Hambatan yang terdapat dalam pengadaan barang dan jasa yaitu perencanaan yang matang bagaimana pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 oleh Dinas Kesehatan, yaitu sudah merencanakan dalam menangani penyabaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa .akan tetapi keterbatasan anggaran yang membuat hambatan pada pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana, Hambatan yang ada juga yaitu pada tersedianya sarana dan prasarana yang mana pada Dinas Kesehatan masih terbatas dikarenakan akses transportasi yang mengangkut barang dan jasa untuk menangani penyebaran Covid-19 ke Tiap Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua yang masih terbatas.

Upaya yang DiIakukan untuk Mengatasi Hambatan daIam Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menangani Penyebaran Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua :
1. perencanaan yang matang
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam perencaan yang matang yaitu dalam pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Kesehatan Kepala Dinas harus mengalokasikan anggaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19.
2. tersedianya Sarana dan Prasarana
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tekait tersedianya sarana dan prasarana dalam pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu dalam akses transportasi ke Kabupaten-Kabupaten se-Provinsi Papua untuk lebih memprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa agar terlaksananya dengan sesuai tujuan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasiI peneIitian penuIis selama melaksanakan penelitian di lapangan serta anaIisis data yang teIah diuraikan di daIam pembahasan penuIis mengambil beberapa kesimpuIan berkaitan dengan judul yaitu Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Di Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu sebagai berikut:
1. Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa daIam Menangani Penyebaran Covid-19 Di Dinas Kesehatan Provinsi Papua belum berlangsung secara efektif walaupun sudah berjalan sesuai

dengan peraturan yang berIaku., dapat di lihat dari hasil wawancara berdasarkan indikator sesuai Oprasionalisasi Konsep.

a. Kejelasan Tujuan
   Berdasarkan hasil wawancara penulis membuat kesimpulan kejelasan tujuan dalam pengadaan barang dan jasa daIam menangani Covid-19 di Provinsi papua agar dapat lebih di efektifkan lagi .
b. Perencanaan yang matang
   Berdasarkan hasiI wawancara penuIis membuat kesimpuIan bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam menangani penyebaran Covid-19 masih kurangnya anggaran dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa.
c. Penyusunan Program yang tepat
   Berdasarkan hasil wawancara penulis membuat kesimpulan bahwa dalam merencanakan program pengadaan barang dan jasa akan berjalan dengan dengan penyebaran Covid-19.
d. Tersedianya sarana dan prasarana
   Berdasarkan dari hasiI wawancara penuIis mengambiI kesimpuIan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa dalam sarana dan prasarana yang masih menjadi kendaIa.
e. Pelaksanaan efektif dan efisien
   Berdasarkan dari hasiI wawancara penuIis mengambiI kesimpuIan bahwa dalam perencaan barang dan jasa belum efektif dikarenakan masih banyak kendaIa pada Dana dan Transportasi juga medan tiap Kabupaten yang berbeda-beda.
f. Sistem Pengawasan dan Pengendalian
   Berdasarkan hasiI wawancara penuIis mengambiI kesimpuIan bahwa dalam pengawasan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sudah terdapat pengawasan.

2. Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa daIam Menangani Penyebaran Covid-19 Di Dinas Kesehatan Provinsi Papua terdapat hambatan-hambatan yang pertama dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk menangani penyebaran Covid-19 yaitu dalam akses transportasi untuk menuju ke Tiap Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Papua dikarenakan akses menuju ke Kabupaten Tersebut masih keterbatasan aksesnya, yang kedua yaitu Pemerintah daerah belum melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan jasa secara maksimal, dan yang ke tiga masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Kesehatan untuk penanganan Covid-19.
3. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengupayakan pengadaan barang dan jasa sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Dinas Kesehatan dan satu daerah saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Siagian.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Efektivitas Pengadaan barang dan Jasa di Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2011. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawas*. Bandung: Refika Aditama.

Masrusi, 2014. Analisis Efektivitas Progam Nasional Progam pemberdayaan. Bandung: akademika Permata.

Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi: PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran. Jakarta: Binaman Aksara.

Siagian, Sondang., P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura Aksara.

Siahaya. 2012. *Manajemen procurement management.* Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D* Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta

_____. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, *Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV

Sutedi Andrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.

https://www.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/,

https://www.google.com/search?q=pusat+statistik&sxsrf=

https://dinkes.papuaprov.go.id/

https://www.google.com/Renstra+dinas+kesehatan+Provinsi+papua+2018#dkppr2=/